



DOK. ISTIMEWAJOGLO JOGJA
Agus Tri Haryono
 Kepala Bappeda
 Kota Yogyakarta

Mandiri Fiskal, PAD Lebih Besar dari Dana Transfer ke Daerah

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat ternyata berdampak positif terhadap keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Dalam APBD 2026 yang telah ditetapkan, Kota Yogyakarta telah mandiri secara fiskal. Indikatornya adalah pendapatan asli daerah

(PAD) 2026 lebih besar dari dana TKD. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono menjelaskan, APBD Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2025 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 1,832

triliun. Pada struktur APBD 2025, proporsi PAD tercatat telah melampaui pendapatan transfer dari pemerintah pusat. "Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kota Yogyakarta semakin meningkat. Pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD, disusul lain-lain PAD yang sah, retribusi daerah, serta hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan," kata Agus saat rapat pimpinan di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta, Senin (5/1/2026).

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, capaian PAD Kota Yogyakarta tahun 2025 berhasil terealisasi sesuai target.

■ Baca **MANDIRI...** Hal II

Mandiri Fiskal, PAD Lebih Besar dari Dana Transfer ke Daerah

sambungan dari hal Joglo Jogja

PAD semula ditargetkan sebesar Rp 1 triliun dan kemudian direvisi menjadi Rp 952 miliar. Karena kekhawatiran tidak tercapai, justru mampu direalisasikan dengan baik.

"Alhamdulillah tercapai. Cukup menggembirakan. Tentu, kami terima kasih kepada BPKAD dan jajaran dan juga bapak ibu semuanya untuk semua terlibat sampai di pamong praja pun semua terlibat, sampai di kelurahan semua terlibat. Kami mengucapkan terima kasih, bersyukur alhamdulillah, ternyata Allah yang

memberikan rezeki, ya, kepada kita semuanya," ungkapnya.

Mantan bupati Kulon Progo ini menekankan, capaian PAD harus diikuti dengan pengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan berorientasi hasil. Seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih awal, mempercepat pelaksanaan kegiatan, dan tidak menunda pekerjaan yang sudah bisa disiapkan sejak sebelum tahun anggaran berjalan.

"Kalau bisa dikerjakan di awal, kerjakan di awal. Jangan menunggu Januari baru mulai. Dengan arus kas yang relatif aman, kita harus

lebih gesit agar program-program yang menyentuh masyarakat bisa segera dirasakan manfaatnya," tegasnya.

Politikus berlatar belakang dokter ini menjelaskan, dalam konteks money follow program, setiap rupiah anggaran harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Makanya, ini harus dibarengi dengan integritas dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan. Termasuk dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia. **(eri/ amd/wa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 06 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005